JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DESA WISATA KERTAWANGI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Raysa Agustin, Rira Nuradhawati[2], Agustina Setiawan[3].
[1,2,3.] Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi desa. Desa Kertawangi Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata alam dan agrowisata yang cukup besar, namun efektivitas pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran pemerintah desa terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori terhadap masyarakat dan pelaku wisata di Desa Kertawangi. Variabel peran pemerintah desa dianalisis berdasarkan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, sedangkan efektivitas masyarakat dianalisis berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan kepuasan masyarakat. Analisis data menggunakan *regresi linier* sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Semakin optimal peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan Desa Wisata Kertawangi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kolaborasi dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengembangan infrastruktur pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan.
Kata Kunci : peran pemerintah desa, desa wisata, efektivitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Tourism village development is a community-based development strategy aimed at improving local welfare through the optimization of natural, social, cultural, and economic resources. Kertawangi Village in West Bandung Regency possesses considerable tourism potential; however, the effectiveness of tourism village management remains constrained by limited infrastructure, institutional capacity, community participation, and the suboptimal role of the village government. This study aims to examine the influence of the village government's role on community

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

effectiveness in managing Kertawangi Tourism Village. A quantitative explanatory survey approach was employed involving community members and tourism stakeholders. The role of the village government was measured through its functions as regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst, while community effectiveness was measured using indicators of goal achievement, integration, adaptation, and community satisfaction. Data were analyzed using simple linear regression. The findings indicate that the role of the village government has a positive and significant influence on community effectiveness in tourism village management. Strengthening institutional capacity, improving collaboration with tourism awareness groups, developing supporting infrastructure, and enhancing community participation are recommended to achieve sustainable tourism village development.
Keywords *: village government, tourism village, community effectiveness, community empowerment, sustainable tourism.*

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal secara mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi pembangunan berbasis potensi lokal adalah pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, serta aktivitas ekonomi masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep desa wisata menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, serta efektivitas peran pemerintah desa dalam memfasilitasi seluruh proses pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, desa wisata diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya yang cukup besar. Salah satu desa yang dikembangkan sebagai desa

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

wisata adalah Desa Kertawangi yang memiliki potensi pertanian, peternakan, wisata alam, serta berbagai kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. Pemerintah Desa Kertawangi bersama masyarakat telah mengembangkan berbagai program wisata berbasis masyarakat, termasuk pengembangan kawasan agrowisata dan program *Big Farmer* sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing desa wisata.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan Desa Wisata Kertawangi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya promosi destinasi wisata, kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata yang dimiliki belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks administrasi publik, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Menurut teori peran pemerintah, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator pembangunan masyarakat. Keempat fungsi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah desa dituntut mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, kelompok sadar wisata, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan desa wisata berjalan secara optimal.

Efektivitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Efektivitas tersebut tidak hanya diukur dari pencapaian target pembangunan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan partisipasi, memperkuat kelembagaan lokal, serta menciptakan inovasi dalam pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, efektivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, dan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

aspek partisipasi masyarakat atau pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian yang secara khusus menguji pengaruh peran pemerintah desa terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata menggunakan pendekatan kuantitatif masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai hubungan antara peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dengan efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran pemerintah desa terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan desa wisata yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori (*explanatory survey*) untuk menganalisis pengaruh peran pemerintah desa terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui analisis statistik inferensial.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kertawangi merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi wisata alam, agrowisata, dan wisata edukasi, serta telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata. Namun demikian, pengembangan desa wisata masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan optimalisasi peran pemerintah desa dan efektivitas masyarakat dalam pengelolaannya.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa yang diukur berdasarkan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Keempat dimensi tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, serta mempercepat proses pembangunan desa wisata.

Variabel dependen adalah efektivitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang diukur berdasarkan indikator pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, integrasi antar pemangku kepentingan, serta kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program desa wisata.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri atas masyarakat Desa Kertawangi yang terlibat dalam kegiatan desa wisata. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta telaah terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Kertawangi. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen telah diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan setiap indikator mampu mengukur konstruk penelitian secara konsisten.

Analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik inferensial menggunakan regresi linier sederhana. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Kertawangi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya alam maupun daya tarik wisata yang dimiliki desa, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Semakin optimal pemerintah desa melaksanakan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas masyarakat dalam

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

mengelola, mengembangkan, serta memanfaatkan potensi desa wisata sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Kertawangi telah melaksanakan berbagai program yang mendukung pengembangan desa wisata, di antaranya penyusunan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada sektor pariwisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian melalui program *Big Farmer*, serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan fungsi pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata.

Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan desa wisata. Kejelasan arah kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata. Regulasi yang disusun pemerintah desa tidak hanya mengatur aspek administrasi, tetapi juga mengarahkan pengembangan potensi lokal agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, fungsi regulasi merupakan instrumen utama pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keteraturan, serta mengarahkan seluruh pemangku kepentingan menuju tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan desa yang responsif terhadap potensi lokal menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata.

Selain menjalankan fungsi regulasi, pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan fasilitasi melalui penyediaan sarana pendukung, pembinaan kelembagaan masyarakat, pendampingan kelompok sadar wisata, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kawasan wisata. Peran fasilitator menjadi penting karena masyarakat tidak selalu memiliki kapasitas maupun sumber daya yang memadai untuk mengembangkan potensi wisata secara mandiri. Pemerintah desa hadir sebagai pihak yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

sumber daya pembangunan sehingga masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas ekonomi maupun sosial.

Walaupun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa responden masih menilai bahwa keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas menuju lokasi wisata, serta promosi destinasi wisata menjadi kendala dalam pengembangan Desa Wisata Kertawangi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata memerlukan dukungan yang lebih luas, tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga dari pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan desa wisata merupakan proses kolaboratif sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi antarlembaga.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator juga terlihat melalui berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa wisata. Pemerintah desa secara aktif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pengembangan desa wisata. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan bentuk implementasi pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan. Menurut Jim Ife, pembangunan masyarakat akan berjalan secara efektif apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa wisata sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam membangun motivasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi sebagai katalisator pembangunan melalui upaya mempercepat proses pengembangan desa wisata dengan membangun kemitraan bersama berbagai organisasi masyarakat, kelompok sadar wisata, pelaku usaha, serta lembaga pendidikan. Peran katalisator tersebut memberikan dampak positif terhadap percepatan pengembangan potensi wisata karena mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pembangunan desa. Dalam perspektif collaborative governance, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pembangunan, melainkan bertindak sebagai

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

penghubung yang mempertemukan berbagai kepentingan sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Pengaruh positif peran pemerintah desa terhadap efektivitas masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kertawangi telah mampu menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan desa wisata secara relatif efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata, bertambahnya kegiatan ekonomi berbasis pariwisata, meningkatnya kerja sama antaranggota masyarakat, serta berkembangnya berbagai inovasi lokal yang mendukung daya tarik wisata desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi telah berkembang menjadi subjek pembangunan yang mampu mengelola potensi desa secara mandiri.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor yang masih menghambat peningkatan efektivitas masyarakat. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan pariwisata, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi, serta terbatasnya jejaring pemasaran produk wisata menyebabkan potensi desa belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Selain itu, keberlanjutan program desa wisata masih sangat bergantung pada tingkat komitmen pemerintah desa dalam melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pariwisata menjadi strategi yang perlu terus dikembangkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori fungsi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yang menyatakan bahwa pemerintah pada hakikatnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan (service), fungsi pembangunan (development), dan fungsi pemberdayaan (empowerment). Ketiga fungsi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Desa Wisata Kertawangi, fungsi pelayanan diwujudkan melalui penyediaan layanan administrasi dan dukungan terhadap masyarakat, fungsi pembangunan diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan wisata, sedangkan fungsi pemberdayaan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Berbagai studi mengenai pengembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa desa yang mampu membangun tata kelola kolaboratif umumnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan desa yang masih mengandalkan pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang mampu membangun modal sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam pengembangan potensi lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah desa merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi. Keberhasilan pembangunan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi wisata, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang partisipatif, memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa, peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan desa wisata, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi wisata, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi strategi penting dalam mewujudkan Desa Wisata Kertawangi sebagai destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran Pemerintah Desa terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal Pemerintah Desa menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, maka semakin tinggi pula

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

tingkat efektivitas masyarakat dalam mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan potensi Desa Wisata Kertawangi sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kertawangi telah melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan melalui penyusunan kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pengembangan berbagai program berbasis potensi lokal, seperti agrowisata dan program *Big Farmer*. Implementasi berbagai program tersebut telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, promosi destinasi wisata, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Efektivitas masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kertawangi tercermin dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata, tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata, serta meningkatnya kerja sama antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat. Namun demikian, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi wisata, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam, tetapi harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Kertawangi terus memperkuat kapasitas kelembagaan desa wisata, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas promosi wisata berbasis teknologi digital, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

kepentingan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Desa Wisata Kertawangi sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Bandung Barat.

Daftar Pustaka

Ryaas Rasyid. (2002). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Jim Ife. (2013). Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice. Cambridge University Press.

Taliziduhu Ndraha. (2015). Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.

George R. Terry. (2014). Principles of Management. Illinois: Richard D. Irwin.

Richard M. Steers. (1985). Organizational Effectiveness: A Behavioral View. Santa Monica: Goodyear Publishing.

Peter F. Drucker. (2007). Management Challenges for the 21st Century. New York: Harper Business.

United Nations World Tourism Organization. (2021). Tourism for Rural Development. Madrid: UNWTO.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Tourism Trends and Policies 2020. Paris: OECD Publishing.

World Bank. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pengembangan Desa Wisata. Jakarta: Kemenparekraf.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Pedoman Umum Pengembangan Desa Wisata. Jakarta: Kemendes PDTT.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6272

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.